

Mau Bangkrut Diguyur

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

Karawang, Toto Suripto juga membenarkan adanya permintaan anggaran penyer-taan modal bagi sejumlah BUMD, yang salah satunya adalah PT LKM. "Ya. Masih pembahasan," singkat Toto.

Jika melihat, Peraturan Bupati Karawang No. 42 Tahun 2020 Tanggal 20 Juli 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karawang No. 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Cellica Nurhadiana semasa belum cuti tertulis anggaraan peyertaan modal untuk BUMD sebesar Rp 17.400.000.000.

Angka pengajuan penyer-taan modal sebesar Rp 17,4 miliar itu tidak ubah dari angka proyeksi APBD karawang 2020 yang disusun dan diproyeksikan sebelumnya adanya pandemi covid-19. Jika melihat dari data proyeksi APBD Karawang, jika anggaran itu lolos disetujui badan anggaran DPRD Karawang di APBD-P 2020 ini, akan dipergunakan untuk penyer-taan modal PDAM Rp 12 miliar untuk PDAM Tirta Tarum. Rp 2,65 miliar untuk PT LKM dan Rp 2.75 untuk

PT BPR Karawang.

Setumpuk Masalah PT LKM PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang (BUMD) diketahui berada di ambang pailit alias kebangkrutan. Sejauh ini kekosongan direksi tak kunjung direspons cepat oleh Pemkab Karawang (Kabag Ekonomi—ex officio). Belum ada publikasi kepada awka media kapan pengisian direksi defenitif akan atau sudah dilangsungkan.

Beberapa anggota Komisi II DPRD Karawang juga sempat menyigun adanya kredit Rp 5,2 miliar melilit keuangan LKM. Sialna, mayoritas pinjama macet itu dilakukan oleh PNS. Tak hanya itu saja, sampai saat ini tak ada publikasi kapan RUPS dilakukan.

"PT LKM di ambang pailit. Bisa dikatakan bangkrut," kata Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Dedi Rustandi 23 Maret 2020 lalu kepada KBE di ruang Fraksi Pangkal Perungan.

Komisi II DPRD Karawang, kata Dedi saat itu, meminta Pemkab Karawang tak mengangap sepele permasalahan yang sedang melilit PT LKM Karawang. Padahal, kata Dedi, jika saja Pemkab Karawang srius mengem-

bankan BUMD ini, bisa menjadi solusi konkret menekan angka ketergantungan masyarakat pada bank emok.

"Pinginnya pemerintah daerah serius menyelesaikan persoalan ini. LKM ini salah satu BUMD wilayah kerjanya jelas, dan jika normal bisa meminimalisir bank emok dan jadi stimulus pemodaln bagi UMKM di Karawang," kata dia.

Bahkan saat itu, Dedi menuturkan, penyer-taan modal untuk menyehatkan lagi PT LKM pun tak bisa dilakukan karena RUPS-nya tak juga kunjung digelar. Padahal, lanjut Dedi, Pemdaprov Jawa Barat sebagai pemili 35% saham PT LKM Karawang sudah bersedia menggelar RUPS. Sebaliknya Pemkab Karawang sebagai pemilik saham mayoritas malah adem ayem.

"Mungkin Pemkab belum siap karena banyak yang perlu dievaluasi. Banyak persoal teknis seperti laporan keuangan yang belum beres mungkin. Saat ini sepengetahuan saya direksi kosong, dan malah dewan pengawas yang mengurus administratif. Jumlahnya kalau tak salah dewa PT LKM dua orang salah satunya ada pensiunan pegawai bank," tutur Dedi. (mhs)